

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi dan sosial yang sulit diselesaikan dalam suatu negara. Di Indonesia, kemiskinan adalah sebuah isu utama yang terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tingkat kehidupan masyarakat yang minim, serta semakin meningkatnya angka pengangguran dari tahun ke tahun, sementara jumlah lowongan pekerjaan tetap terbatas (Larasati Prayoga et al., 2021). Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa, faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan, distribusi pendapatan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

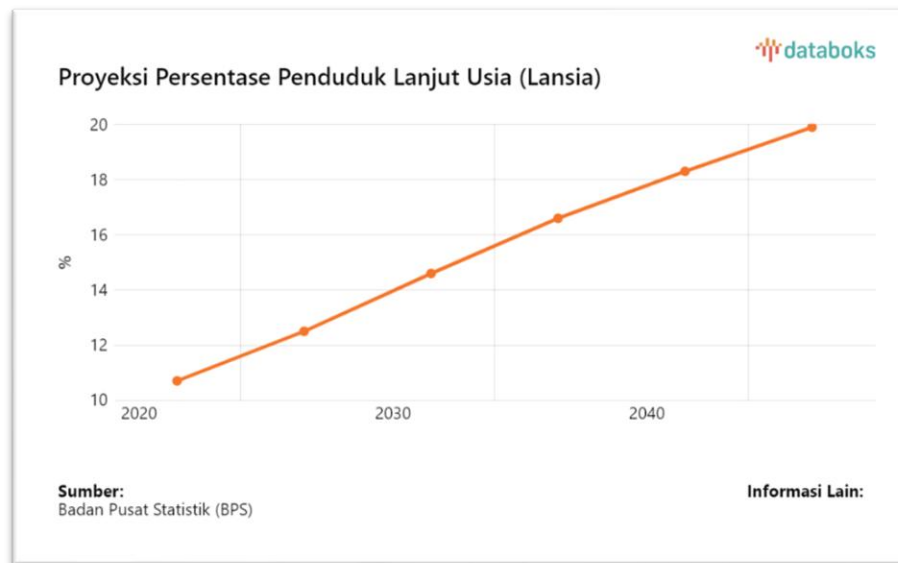
Permasalahan kemiskinan harus ditempatkan dalam kerangka multidimensi, artinya faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan atau upah, akan tetapi sejumlah persoalan lainnya, seperti kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan, tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, dan perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga kurangnya pilihan dan peluang,

pelanggaran martabat manusia, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang penting untuk diatasi karena kemiskinan sendiri menimbulkan permasalahan sosial seperti mendorong terjadinya kejahatan, menciptakan stratifikasi sosial, dan meningkatnya angka kematian, serta berbagai konflik yang timbul di masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu isu dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) kemiskinan merupakan pilar pertama yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan (*no poverty*). Target SDGs dalam mengakhiri kemiskinan, yakni membangun dan menjamin upaya perlindungan dan ketahanan masyarakat yang termasuk kategori kelompok miskin dan rentan sehingga mengurangi kerentanan masyarakat tersebut terhadap dampak kondisi ekstrim terkait iklim, guncangan, bencana, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peran pemerintah Indonesia dalam mengakhiri kemiskinan terbagi menjadi dua, yakni dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberdayakan masyarakat usia produktif. Selain itu, melaksanakan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin yang sudah rentan atau sudah lansia.

Kelompok yang paling rentan terhadap risiko kemiskinan adalah kelompok lanjut usia karena sudah tidak termasuk dalam kategori usia produktif (60 tahun keatas) sehingga pemasukan pendapatan lebih sedikit namun harus memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seiring bertambahnya usia semakin meningkatnya kebutuhan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Penduduk lansia digambarkan sebagai kelompok rentan menurut Bloom et al. (dalam TNP2K, 2020) menyatakan

bahwa ada tiga faktor utama yang menjadikan lansia rentan, yaitu tidak lagi efektif dalam kegiatan ekonomi, permasalahan kesehatan, dan perlunya pendampingan seperti *caregiver* (penolong).



Sumber: databoks (2021)

Penduduk Indonesia berada pada struktur penduduk tua (*ageing population*) karena persentase penduduk lanjut usia yang sudah lebih dari 10%. Menurut BPS, menyatakan bahwa penduduk lansia sudah melebihi persentase 10% sejak tahun 2020. Persentase tersebut diproyeksikan semakin meningkat menjadi 12,5% dalam lima tahun mendatang. Penduduk lansia pada tahun 2020 diperkirakan persentase 10,7%. Jumlah ini semakin naik menjadi 14,6% (2030), 16,6% (2035), 18,3%, (2040), dan 19,9% (2045). Hampir seperlima dari seluruh penduduk sudah memasuki lanjut usia dan sudah berada pada tahapan angka kematian dan angka kelahiran yang rendah.

Tabel 1. 1 Persentase Lanjut Usia Menurut Kelompok Pengeluaran
di Indonesia Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran		
Terbawah	Menengah	Teratas
43,29%	37,40%	19,31%

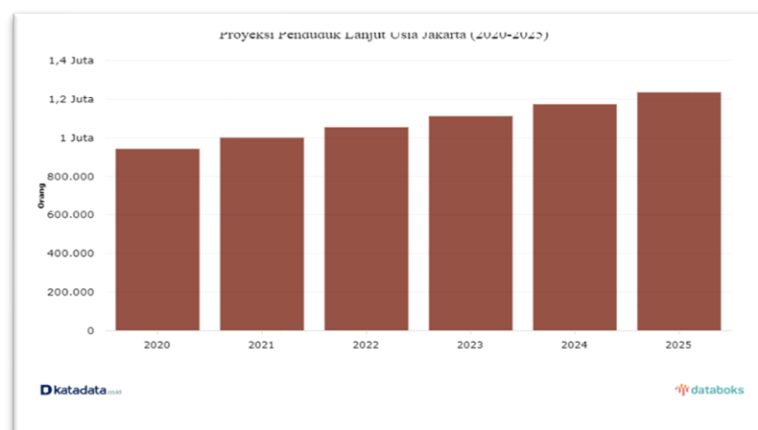
Sumber: BPS, Susenas (2021)

Peningkatan penduduk lansia di Indonesia perlu menjadi perhatian karena lansia rentan terhadap kemiskinan cukup tinggi karena jaminan kesehatan bagi para lansia dan dana pensiun sangat terbatas. Status perekonomian lansia dapat dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran lansia tersebut. Jika dilihat dari situasi perekonomian, mayoritas penduduk lanjut usia berasal dari rumah tangga pada kelompok pengeluaran terbawah dengan persentase 43,29%.

Kemiskinan pada kelompok lansia tahun 2021 mencapai 13,15%, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 10,14% (Susenas, 2021). Pada dasarnya, seseorang yang sudah memasuki usia lanjut tentunya akan mengalami pengurangan pemasukan bahkan kehilangan pendapatan. Oleh karena itu, perlu adanya program perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 terkait kesejahteraan lanjut usia (lansia) khususnya Pasal 8 yang menyatakan bahwa keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab terhadap lanjut usia dalam mewujudkan

kesejahteraan karena lanjut usia mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan dan diperhatikan sehingga menjaga rasio perlindungan sosial terhadap lanjut usia.

Program perlindungan sosial di Indonesia untuk kelompok lanjut usia, yakni bantuan sosial. Bantuan sosial untuk kelompok lanjut usia dapat berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program bantuan sosial untuk lanjut usia dari pemerintah pusat, yakni Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki program perlindungan sosial bagi lanjut usia yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Kartu Lansia Jakarta (TNP2K, 2020). Program Kartu Lansia Jakarta disalurkan mulai tahun 2018 yang bertujuan untuk membantu lanjut usia yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar.



Gambar 1. 2 Proyeksi Penduduk Lanjut Usia di Jakarta

Sumber : databoks (2021)

Pada masa yang akan datang perkiraan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Jakarta semakin meningkat. Diperkirakan pada tahun 2024 jumlah penduduk lanjut usia mencapai 1,17 juta jiwa dan pada tahun 2025 jumlah penduduk lanjut

usia diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus mengenai pengembangan di bidang lansia dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Kelompok lansia juga membutuhkan rasa nyaman dan aman, baik secara psikologis ataupun fisik seiring dengan kondisi metabolisme tubuh mereka yang mengalami penurunan.

Program perlindungan sosial memiliki perhatian khusus terhadap kelompok lansia miskin memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan mereka. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia meliputi pelayanan kesehatan, kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan bantuan sosial merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, serta strategi menciptakan penduduk lansia yang sehat, produktif, dan menjadi kawasan ramah lansia masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 1. 2 Persentase Lanjut Usia Kabupaten/Kota
di DKI Jakarta Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki dan Perempuan (%)
Kep. Seribu	7,30	7,23	7,26
Jakarta Selatan	9,96	10,96	10,46
Jakarta Timur	9,42	10,21	9,81
Jakarta Pusat	10,90	12,88	11,87
Jakarta Barat	9,37	10,50	9,93
Jakarta Utara	9,00	10,12	9,55
DKI Jakarta	9,59	10,67	10,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022)

Penduduk lansia DKI Jakarta memiliki persentase total jumlah keseluruhan 10, 13 % pada tahun 2022. Persentase lanjut usia tiga kota terbesar DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat 11,87 %, Jakarta Selatan 10,46%, dan Jakarta Barat 9,93%. Dengan demikian, persentase lanjut usia di DKI Jakarta yang telah melebihi 10% membuat alokasi anggaran daerah untuk program Kota Lansia (KLJ) terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan bertambahnya jumlah lansia yang menjadi sasaran.

Program Kartu Lansia Jakarta termasuk dalam program Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar tidak hanya Kartu Lansia Jakarta melainkan terdapat Kartu Anak Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.



Gambar 1. 3 Distribusi Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui Kartu Lansia Jakarta Tahun 2024

Sumber: *Instagram* Dinas Sosial DKI Jakarta (2024)

Berdasarkan data tahun 2024 jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta dalam Bantuan Penerima Kebutuhan Dasar merupakan tertinggi, yakni 135.139 penerima manfaat dibandingkan jumlah penerima manfaat Kartu Anak Jakarta dan penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi lanjut usia atau disebut Kartu Lansia Jakarta yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termuat dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial.

Program Kartu Lansia Jakarta bertujuan untuk membantu kelompok lansia yang tidak memiliki pendapatan tetap maupun yang pendapatannya sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, rentan terhadap penyakit, serta lansia yang terlanjar secara psikis dan fisik. Penyaluran dana bantuan sosial dengan menggunakan Kartu Lansia Jakarta diterbitkan oleh Bank DKI Jakarta untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan transaksi pemegang kartu dari memanfaatkan bantuan sosial tersebut.

Kartu Lansia Jakarta diberikan kepada masyarakat lansia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kuota penerima bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta ditentukan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diseleksi melalui musyawarah kelurahan. Penentuan kelayakan calon penerima bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta melalui musyawarah kelurahan dilaksanakan untuk memastikan keberadaan dan validitas status calon data penerima, serta menentukan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi calon penerima program Kartu Lansia Jakarta. Musyawarah kelurahan ini

melibatkan lurah sebagai pemimpin musyawarah kelurahan, serta seluruh anggota dari jajaran RT, RW, LMK, PKK, dan tokoh masyarakat lainnya.

Tabel 1. 3 Distribusi Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penerima KLJ (%)
Kepulauan Seribu	0,44
Jakarta Selatan	22,37
Jakarta Timur	15,13
Jakarta Pusat	17,28
Jakarta Barat	30,15
Jakarta Utara	14,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022)

Distribusi penerima Kartu Lansia Kabupaten/ Kota DKI Jakarta tertinggi, yaitu Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat memiliki data jumlah lanjut usia dan pengguna Kartu Lansia Jakarta tertinggi, dari 13.849 peserta tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 31.488 peserta KLJ pada tahun 2022 di Kota Jakarta Barat. Dengan demikian, bahwa Kota Jakarta Barat dapat dikatakan sebagai kota yang memiliki kelompok lanjut usia yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memiliki presentase peserta program KLJ 30,15%.

Kelompok lanjut usia memiliki berbagai kerentanan dan keterbatasan namun sangat disayangkan mengenai bantuan sosial kepada kelompok lanjut usia masih belum optimal. Permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta, yakni ketidaksesuaian program dengan kelompok sasaran sehingga terdapat kelompok lansia yang memenuhi persyaratan namun belum mendapatkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta.

"Walaupun foto-fotonya transparan dalam seleksi data-data untuk mendapatkan KLJ, KPDJ & KAJ, tapi yang dapat hanya warga yang telah menerima sebelumnya. Sedangkan yang baru-baru tidak ada yang dapat," keluh @hendroroll309.

"Tetangga saya malah dapat, padahal punya rumah dan kontrakan. Semenjak ada musyawarah kelurahan nggak jelas," kata @fitriapriany90. "Tetangga saya sudah 2 tahun, suami-istri dapat dua-duanya min," terang @dewi22_07.

Gambar 1. 4 Ketidaksesuaian kelompok sasaran program KLJ

Sumber: Tangselpos.id (2022)

Ketidaksesuaian kelompok sasaran program KLJ dapat dilihat dari kelompok lansia yang tidak memenuhi syarat dan kriteria berstatus ekonomi rendah, namun tetap mendapatkan bantuan sosial tersebut. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hasil pendaftaran melalui musyawarah kelurahan. Selain itu, mayoritas yang mendapatkan bantuan sosial peserta lama sehingga terdapat masyarakat menyampaikan keluhan program KLJ tersebut melalui akun resmi Dinas Sosial melalui *Instagram* @dinsosdkijakarta.



Gambar 1. 5 Nenek Mben (75) Hidup Tak Layak Tidak Menikmati Kartu Lansia Jakarta

Sumber: Tribunnews (2023)

Ketidaksesuaian kelompok sasaran program Kartu Lansia Jakarta di Jakarta Barat, misalnya dirasakan oleh nenek Mben di RW 007 Kelurahan Tanah Sereal, Kec. Tambora Jakarta Barat yang hidup sebatang kara tanpa suami, anak, dan cucu (Tribunnews, 2023). Nenek Mben memenuhi kehidupan sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan dari warga sekitar yang merasa iba terhadap dirinya. Permasalahan yang dihadapi oleh Nenek Mben merupakan ketidaktepatan sasaran kelompok lansia dalam penerima program bantuan sosial KLJ karena tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut sehingga sehingga pengelolaan pendataan penerima KLJ belum berjalan baik.

Berikut adalah beberapa hambatan kelompok lansia di Jakarta Barat dalam menerima bantuan program KLJ:

Nia seorang warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat mempertanyakan kepada Dinas Sosial DKI Jakarta mengapa nama orangtuanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta. Orang tua Nia sudah memenuhi persyaratan Kartu Lansia Jakarta namun Ayah Nia tidak menerima bantuan lansia ataupun disabilitas meskipun namanya sudah terdaftar sebagai penerima bantuan di sistem Dinas Sosial DKI Jakarta (Nasdem Jakarta, 2023).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok lansia di Jakarta Barat mengalami ketidaksesuaian sasaran program Kartu Lansia Jakarta sehingga banyak sekali kelompok lansia yang terlanter tidak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena tidak dapat merealisasikan program dengan baik sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Box 2 : Kendala Penerima Manfaat Program KLJ di Jakarta Barat

Kelompok lansia di Jakarta Barat mengalami hambatan dalam penerimaan bantuan KLJ. Menurut Rina (@Rina_alone) mengatakan bahwa setiap warga di Kelurahan Kota Bambu Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dimintai uang ketika dana sudah cair setiap bulan Rp800.000. Selanjutnya, menurut Abdul (@Abdul39281495) menyampaikan keluhannya mengenai petugas penyalur bantuan sosial yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar ketika pengambilan KLJ data form sudah diambil oleh petugas namun kartunya belum diberikan sampai sekarang di Jakarta Barat (Sumber : Aplikasi X, 2022)

Permasalahan penyaluran Program Kartu Lansia Jakarta di Jakarta Barat yang belum berjalan dengan baik karena pengelolaan data kemiskinan dan pelaksanaan program di lapangan yang masih belum optimal sehingga tidak bertanggung jawab dalam merealisasikan program bantuan sosial tersebut. Jika, terus seperti ini dapat meningkatkan angka kemiskinan kelompok lansia. Dalam hal ini, pelaksana program harus memiliki perbaikan dalam pengelolaan data kemiskinan dan etos kerja yang baik sehingga fokus pada pencapaian hasil Program Kartu Lansia Jakarta dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia di Jakarta Barat.

Peneliti ingin membahas mengenai kesesuaian implementasi program dalam mengelola program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Kesesuaian implementasi program berkaitan dengan program, organisasi pelaksana, dan kelompok penerima manfaat sehingga dapat mengetahui seberapa jauh pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program sehingga dapat meningkatkan perbaikan pelayanan program bantuan sosial kepada kelompok sasaran sesuai dengan intervensi program. “Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta terhadap kesesuaian kelompok sasaran di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora?”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian kelompok sasaran dalam Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora?
2. Apa hambatan dalam program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian kelompok sasaran dalam Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora.
2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah informasi baik bagi peneliti maupun pihak lain dalam meneliti topik kesesuaian

kelompok sasaran dalam Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah pengetahuan peneliti dan menjadi bahan masukan kepada para aktor terkait dalam pengelolaan program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama membahas mengenai efektivitas dan hambatan dalam program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yang bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya lanjut usia yang terlantar. Namun, dalam pelaksanaan program ASLUT di Kecamatan Pugaan belum efektif karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi secara merata mengenai persyaratan dan pemantauan kepada lansia yang terlantar untuk menerima hanya satu bantuan tidak boleh lebih dari satu (Ramadhan et al., 2024).

Geiska Rievy Lupe Pinthor, Indah Murti, dan Anggraeny Puspaningtyas melakukan studi yang berfokus untuk melakukan evaluasi pada program permakanan untuk lanjut usia miskin di Kelurahan Wonorejo. Hasil studi ini menemukan bahwa implementasi program berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk lansia miskin namun terkendala dalam akurasi data penerima dan diperlukan verifikasi ulang karena adanya informasi lansia hidup sendiri akan diberi

bantuan langsung bantuan sosial oleh pusat namun kenyataannya tidak menerima bantuan oleh pemerintah pusat (Pinthor et al., 2023).

Selaras dengan penelitian sebelumnya, Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani, Rining Nawangsari melakukan studi yang berfokus untuk menganalisis implementasi Program Kartu Lansia Jakarta untuk memenuhi kebutuhan lansia yang berasal dari keluarga tidak mampu. Hasil dari studi ini menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial merupakan para lansia sehingga kurang memahami pelaksanaan kebijakan baik dari persyaratan ataupun prosedur yang dilaksanakan suatu program sehingga sosialisasi diperlukan secara menyeluruh untuk masyarakat lanjut usia dapat tepat sasaran (Hartanti & Aryani, 2022).

Terdapat penelitian yang membahas mengenai komunikasi yang efektif antara pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat merupakan hal penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Karangwaru. Studi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya yang kompeten sebagai pendamping sosial dan aparat kelurahan memiliki keberhasilan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Namun, terdapat kendala mengenai pembagian tugas yang belum optimal dapat mempengaruhi efektivitas program (Wijayanti et al., 2025).

Ferry Mursyidan Nugraha dan Ilmi Usrotin Choiriyah melakukan studi yang berfokus dalam analisis implementasi Program Posyandu Lanjut Usia di Desa Kedung. Hasil studi ini menemukan implementasi program belum berjalan secara optimal karena terkendala dalam aspek sumber daya, baik tenaga manusia, anggaran, dan fasilitas, serta kurangnya kejelasan SOP membuat mekanisme,

sistem operasional, dan pembagian tugas menjadi tumpang tindih dan tidak teratur (Nugraha & Choiriyah, 2024).

Ahmad Rizal dan Susilahati melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Lansia Jakarta dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia. Hasil Studi ini menjelaskan bahwa implementasi program faktor pendukung keberjalanan program karena dukungan pelaksana kelurahan, pendamping sosial, dan RT RW, serta masyarakat sehingga menghasilkan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada sasaran program. Namun terdapat kendala, yakni kurangnya sosialisasi di tingkat provinsi melalui situs ataupun *website* sehingga penyebaran informasi masih terbatas.

Selanjutnya, terdapat pula penelitian yang membahas mengenai keberhasilan implementasi program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Belimbing untuk mewujudkan permukiman layak huni yang ditulis oleh Abdurrahman dan Eddy Suriyani. Hasil studi ini menjelaskan bahwa implementasi program sudah tercapai dengan baik dengan pemuahan 3 unsur, yakni program sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran, pelaksana program sudah mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, dan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan program (Abdurrahman & Suriyani, 2022).

Reza Darmiyanti menggunakan metode kualitatif deskriptif menjalankan penelitian yang berfokus pada analisis implementasi program PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Temuan penelitian menyatakan bahwa implementasi program sudah berhasil dalam pengentasan kemiskinan karena dalam elemen program sudah memiliki tujuan dan anggaran

yang jelas, elemen organisasi pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tupoksi, dan elemen sasaran program yang sudah terdata sehingga akurat dan tepat sasaran (Darmiyanti, 2022).

Tiara Fernanda dan Lukman Arif melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis program bantuan sosial pemberian makanan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo. Hasil studi ini menemukan bahwa implementasi program pemberian makanan gratis sudah terlaksana dengan baik karena dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah memiliki strategi yang baik sehingga pemahaman antar pelaksana dan kelompok penerima manfaat mudah dipahami (Fernanda, 2023).

Eka Afrina Djamhari, dkk melakukan analisis kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia. Temuan penelitian menyatakan bahwa program perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal penting dalam kebutuhan dan layanan dasar lanjut usia sehingga perlunya meningkatkan program bantuan sosial yang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Djamhari et al., 2020).

Pemilihan isu yang diangkat menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu menganalisis kesesuaian kelompok sasaran dalam program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kec. Tambora. Ketidaktepatan kelompok sasaran penerima manfaat program pemerintah merupakan isu yang sering diperbincangkan dalam publik terutama dalam program pemerintah yang bertujuan untuk membantu kelompok rentan, misalnya program Kartu Lansia Jakarta yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbaruan dalam penggunaan teori, yaitu

menggunakan konsep tepat target oleh Riant Nugroho sebagai pendukung teori kesesuaian implementasi oleh David. C Korten agar memastikan bahwa proses pelaksanaan implementasi ditujukan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan dan relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN /TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	M. Anshari Ramadhan, Arif Budiman, dan Mahdalina, 2024	Melakukan analisis efektivitas dan faktor yang mempengaruhi program ASLUT di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong	Teori Efektivitas Program oleh Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto)	Deskriptif Kualitatif.	Efektivitas Program ASLUT di Kecamatan Pugaan masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa kendala terkait ketepatan sasaran, waktu pencairan, sosialisasi, serta proses monitoring dan evaluasi. Meskipun demikian, program ini telah memberikan dampak positif pada perubahan ekonomi dan kesejahteraan lansia. Dengan meningkatkan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif bagi lanjut usia yang membutuhkan.
2.	Geiska Rievy Lupe Pinthor, Indah Murti, dan Anggraeny Puspaningtyas, 2023	Melakukan evaluasi program permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Wonorejo Surabaya	Teori Evaluasi Kebijakan oleh William N. Dunn	Deskriptif Kualitatif.	Program Permakanan di Kelurahan Wonorejo telah terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program ini telah mencakup aspek-aspek penting seperti efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam hal efisiensi, terutama terkait akurasi data penerima serta

					adaptasi penggunaan teknologi dalam proses pelaporan..
3.	Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani, 2022	Melakukan analisis implementasi Program Kartu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021	Teori Implementasi Program oleh George Edwards III (dalam Subarsono)	Deskriptif Kualitatif.	Sosialisasi merupakan masalah utama yang dihadapi, karena masih banyak lansia yang kurang memahami pelaksanaan kebijakan program, baik dari segi persyaratan maupun prosedur yang terkait dengan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
4.	Ika Wijayanti, dkk, 2025	Melakukan analisis implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Karangwaru, Tegalrejo.	Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edwards III	Deskriptif Kualitatif.	Komunikasi yang efektif antara pendamping sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai program bantuan. Dukungan sumber daya, seperti staf pendamping yang kompeten dan fasilitas yang memadai, juga merupakan faktor penentu. Selain itu, sikap positif dari pendamping sosial serta aparat kelurahan memiliki peran penting. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam koordinasi dan pembagian tugas di tingkat RT yang belum optimal.
5.	Ferry Mursyidan Nugraha dan Ilmi Usrotin Choiriyah, 2024	Melakukan analisis implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin.	Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dalam (Kurniawan dan Suswanta)	Deskriptif Kualitatif.	Pelaksanaan program masih belum berjalan secara optimal. Kendala utama terdapat pada aspek sumber daya, baik dalam hal tenaga manusia, anggaran, maupun fasilitas. Kurangnya kejelasan mengenai SOP yang diterapkan membuat mekanisme pelaksanaan, sistem operasional, pembagian tugas, serta jumlah tenaga kesehatan dan kader yang terlibat menjadi tidak teratur. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih dalam tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan.

6,	Ahmad Rizal dan Susilahati, 2023	Melakukan analisis implementasi Program Kartu Lansia Jakarta dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia.	Teori Kesesuaian Implementasi oleh David Korten.	Deskriptif Kualitatif.	Program Kartu Lansia Jakarta memiliki beberapa faktor pendukung yang mempermudah pelaksanaannya. Di antaranya adalah adanya dukungan dari pihak kelurahan, pendamping sosial, serta RT/RW, yang menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan sasaran program. Namun, terdapat faktor penghambat yang perlu diperhatikan, yakni kurangnya optimalisasi sosialisasi Program Kartu Lansia Jakarta di tingkat provinsi, seperti penggunaan situs atau website resmi. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penyaluran dana setiap bulan.
7,	Abdurrahman dan Eddy Suriyani, 2023	Melakukan analisis implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak.	Teori Kesesuaian Implementasi oleh David Korten.	Deskriptif Kualitatif.	Program KOTAKU dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Belimbing Raya sudah terimplementasi dengan baik karena program dilaksanakan sesuai dengan prosedur di lapangan, pelaksana program sudah dibimbing dengan cara diklat mengenai pelaksanaan tugas, dan bertanggung jawab pelaksana program dalam membangun dan merawat fasilitas dan sarana.
8.	Reza Darmiyanti, 2022	Melakukan analisis implementasi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020.	Teori Kesesuaian Implementasi oleh David Korten.	Deskriptif Kualitatif.	Program PKH sudah mencapai tujuan program dengan adanya kejelasan dalam pelaksanaan dan transparansi anggaran, sudah terstruktur pelaksana program, dan sasaran sudah jelas dengan adanya data graduasi setiap tahunnya sehingga kelompok sasaran sudah berdasarkan DTKS.

9.	Tiara Fernanda dan Lukman Arif, 2023	Melakukan analisis implementasi Program Bantuan Sosial Pemberian Makanan Gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo	Teori Kesesuaian Implementasi oleh David Korten.	Deskriptif Kualitatif.	Program bantuan sosial makanan gratis sudah berjalan dengan baik karena prosedur pelaksanaan sudah jelas sehingga tidak ada hari libur dan jam pengiriman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi yakni belum tepat sasaran sehingga perlu ditingkatkan mengenai kinerja pelaksana TKSK.
10.	Eka Afrina Djamhari, dkk, 2020	Melakukan analisis kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia	Teori Kesesuaian Implementasi oleh David Korten.	Kuantitatif dan Kualitatif	Pemerintah perlu meningkatkan program perlindungan lansia tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar namun secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, serta didukung oleh kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kesejahteraan dan perlindungan sosial lansia.

Sumber: Diolah peneliti (2024)

1.5.2 Konsep Administrasi Publik

Menurut Felix A, Nigro dan L.Loyd G. Nigro dalam (Pasolong, 2022) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kerjasama antar lembaga pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam merumuskan kebijakan. Administrasi publik juga berkaitan dengan sektor privat dan sektor publik dalam melayani masyarakat.

Menurut Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2022) mendefinisikan administrasi publik adalah pemahaman terhadap cara bekerja pemerintah berkaitan erat dengan hubungan masyarakat melalui teori dan praktik sehingga menciptakan kebijakan publik yang responsif terhadap permasalahan di masyarakat.

Administrasi publik juga mengembangkan praktik-praktik manajemen sehingga dalam melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2022) mendefinisikan bahwa administrasi publik adalah sumber daya dan personel publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan ataupun penyempurnaan dari bidang sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran.

Berdasarkan definisi administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerjasama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam administrasi publik, peran pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai penerima sasaran sehingga tertib dan patuh terhadap keputusan pemerintah. Administrasi publik berkaitan erat dengan pengambilan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam kajian administrasi publik, dalam hal ini program Kartu Lansia Jakarta merupakan program bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar lansia di DKI Jakarta sehingga diperlukan implementasi yang tepat sehingga program relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran dan berdampak langsung kepada kelompok sasaran sebagai penerima manfaat program Kartu Lansia Jakarta.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan dan perubahan paradigma merupakan suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk mempelajari perkembangan disiplin ilmu tersebut. Kuhn dalam (Keban, 2014) Paradigma merupakan suatu cara pandang, metode, prinsip dasar, dan cara menyelesaikan suatu masalah yang dianut oleh aktivis ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Nicholas Henry dalam (Sunu, Retno, Hardi Warsono, 2020) menyatakan bahwa ilmu administrasi publik telah berkembang sebagai berikut:

1. Paradigma 1 : Dikotomi Politik-Administratif (1900-1926)

Pemisahan antara politik dan administrasi terjadi karena beralihnya kepentingan umum ke fokus politik. Politik mengutamakan kebijakan dan kebutuhan masyarakat melalui lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Paradigma ini melihat administrasi sebagai nilai yang bebas dan mempunyai tujuan dalam mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus administrasi publik. Prinsip administrasi disebut sebagai PODSCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Paradigma ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik bersifat universal sehingga focus lebih ditekankan dari pada locusnya.

3. Paradigma 3 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini melihat administrasi negara juga sebagai ilmu politik karena pemisahan antara politik dan administrasi tidak mungkin terjadi. Dalam paradigma ini juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak bersifat universal dan tidak menyelesaikan permasalahan fokus administrasi publik.

4. Paradigma 4 : Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menjelaskan fokus pada prinsip-prinsip manajemen secara ilmiah dan mendalam, seperti perilaku organisasi, komunikasi, kepemimpinan, prosedur, dst. Paradigma ini memfokuskan kepada disiplin psikologi sosial dan kebijakan publik, fokus yang dikembangkan dapat digunakan secara bebas sehingga locus menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik merupakan sudah memiliki fokus dan locus yang jelas, fokus administrasi publik berupa teori organisasi, kebijakan publik, dan manajemen, sedangkan locusnya merupakan masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma terbaru dalam ilmu administrasi publik disebut sebagai paradigma pemerintahan atau tata kelola. Paradigma ini menekankan keterlibatan *stakeholders* di luar lembaga pemerintahan untuk menjalin kemitraan dalam keterlibatan program dan kebijakan publik sehingga mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah. Paradigma tata kelola melibatkan kemitraan yang terdiri dari masyarakat, organisasi masyarakat, sektor publik dan swasta dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Gibson, dalam Ikeanyibe 2017).

Berdasarkan 6 paradigma diatas, penelitian ini masuk dalam paradigma Ke-5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan publik.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan proses pembuatan kebijakan dan implementasi yang berkaitan dengan pemerintah, sektor privat, dan sektor publik. Kebijakan dipandang dari perspektif “filosofis” yang mengartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan sebuah “produk” yang menghasilkan rekomendasi berupa program. Kebijakan merupakan “proses” cara atau mekanisme dalam mencapai produknya dan sebuah “kerangka kerja” menetapkan isu, strategi, dan implementasi (Donovan dan Jackson, dalam Keban 2014).

Pengertian Kebijakan Publik menurut William N. Dunn dalam (Sugandi, 2011) mendefinisikan kebijakan publik merupakan pengambilan keputusan lembaga atau pemerintah yang mengatur atau mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pengertian Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye dalam (Sugandi, 2011) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Artinya bahwa, pemerintah mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pilihan tersebut harus memiliki tujuan

yang kuat dan objektif yang mengarah pada kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan seluruh tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan memenuhi keinginan pemerintah ataupun kepentingan pejabat saja.

Pengertian Kebijakan Publik menurut Carl J. Friedrich dalam (Sugandi, 2011) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh lembaga pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan hambatan dan memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan peraturan yang mengikat seluruh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan publik sebagai pelaksana program dan masyarakat sebagai penerima sasaran.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn (dalam Winarno, 2014: 36-37) sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses penting dalam mengelola kebijakan publik. Dalam penyusunan agenda merupakan tahapan penting karena proses merencanakan apa yang menjadi kebutuhan dan menentukan isu publik yang akan diangkat dalam suatu rencana kegiatan

atau agenda pemerintah. Isu kebijakan merupakan masalah publik yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah karena permasalahan tersebut sudah masuk semua kalangan masyarakat sehingga isu tersebut perlu diselesaikan melalui kebijakan publik.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan proses identifikasi masalah oleh pembuat kebijakan. Penyelesaian masalah tersebut diidentifikasi dengan menggunakan alternatif kebijakan atau pilihan kebijakan yang tepat sesuai dengan isu yang dibahas. Dalam hal ini, alternatif kebijakan atau pilihan kebijakan yang sudah dibuat oleh para pembuat kebijakan dipilih yang paling terbaik dengan melakukan perbandingan konsekuensi secara aspek positif ataupun aspek negatif dalam memecahkan masalah.

3. Adopsi Kebijakan

Tujuan adopsi kebijakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan melalui dukungan para pihak-pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini, membahas mengenai kriteria dan pelaksana kebijakan yang sudah sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, selanjutnya akan direkomendasikan ke tahap selanjutnya, yaitu implementasi kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan merealisasikan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan mempunyai tanggung jawab yang besar kepada kelompok sasaran dalam mencapai suatu tujuan kebijakan. Dalam implementasi, masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja para aktor

pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi berkaitan erat dengan prosedur, sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah terlaksana dalam mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, evaluasi dilihat sebagai salah satu pengukuran kebijakan dengan cara mengetahui dampak dihasilkan apakah sudah mencapai target. Hasil dari evaluasi kebijakan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam suatu kebijakan sehingga dapat melaksanakan perbaikan kebijakan dan menyesuaikan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. 6 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

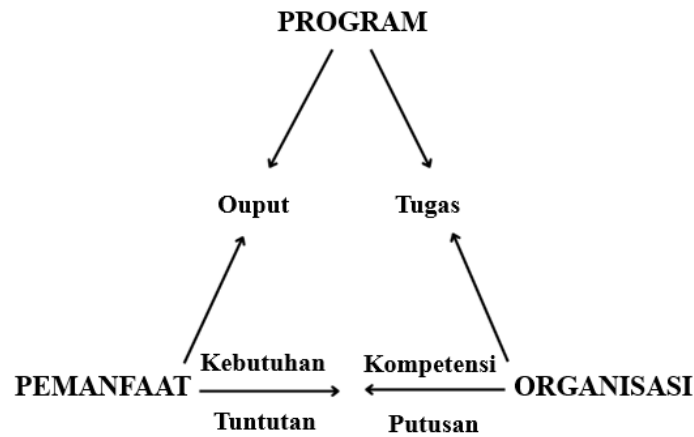
Sumber: William N. Dunn (dalam Winarno, 2014)

Penelitian ini merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik, yaitu implementasi kebijakan. Program merupakan tindak lanjut dari kebijakan publik yang melibatkan suatu rangkaian prosedur, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Keberhasilan implementasi program berkaitan dengan ketepatan implementasi yang dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan kelompok penerima manfaat.

1.5.6 Implementasi Program

Dari proses kebijakan dioperasionisasikan dalam bentuk program-program. Program juga dapat dikatakan sebagai produk implementasi dapat berupa pelayanan maupun barang (Nugroho, 2023). Implementasi merupakan proses merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, unit, dan metode dalam melaksanakan suatu program (Keban, 2014). Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan dan penerapan. Pelaksanaan implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon dalam Keban, 2014). Program merupakan rangkaian kegiatan sebagai perwujudan dari suatu kebijakan (Bahri et al., 2020).

Menurut David C. Korten (dalam Bahri et al., 2020) Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari kesesuaian implementasi. Model kesesuaian implementasi program yang diusulkan oleh David Korten, sebagai berikut:



Gambar 1. 7 Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020)

Kesesuaian implementasi program dapat berhasil dilaksanakan jika terpenuhi kesesuaian dari 3 unsur implementasi program, yaitu sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara Program dan Penerima Pemanfaat

Kesesuaian yang dimaksud terjadi antara program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran atau target penerima manfaat. Aspek kesesuaian program dapat diukur dengan kejelasan tujuan program dan strategi yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan tujuan program.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian yang dimaksud mengacu pada kompetensi aktor pelaksana program dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program. Organisasi pelaksana sebagai implementator program dapat diklasifikasikan sebagai sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang memengaruhi pencapaian tujuan program. Aspek kesesuaian organisasi pelaksana dapat diukur dengan pemahaman dan komitmen karena kedua aspek tersebut berkaitan dengan pemahaman aktor pelaksana dalam

mencapai tujuan program sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang prima. Sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting dalam melaksanakan program karena sebagai pendukung aktor pelaksana dalam mewujudkan tujuan program.

3. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana untuk memperoleh output program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran program. Kelompok sasaran sudah diputuskan berdasarkan analisis kebutuhan oleh pembuat kebijakan atau pengelola program. Maka dari itu, memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kelompok sasaran merupakan salah satu cara yang efektif dalam merancang program yang lebih relevan dan tepat sasaran.

Menurut Richard E. Matland (dalam Sholeh et al., 2021) mengembangkan teori mengenai model ambiguitas-konflik, teori ini menjelaskan mengenai seberapa berhasil implementasi kebijakan diimplementasikan dilihat melalui tingkat ambiguitas dan tingkat konflik. Tingkat ambiguitas menjelaskan mengenai tujuan kebijakan yang jelas tidak ambigu, sedangkan tingkat konflik menjelaskan bahwa terdapat masalah atau tidak mencapai kesepakatan antar aktor implementasi sehingga menghambat implementasi kebijakan. Teori Matland juga berpendapat bahwa efektivitas kebijakan memiliki prinsip “empat tepat” dalam menganalisis kesesuaian antara rencana kebijakan dengan kondisi lapangan, sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan : Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Ketepatan Pelaksanaan : Aktor implementasi kebijakan disesuaikan dengan tujuan kebijakan dibuat sehingga tidak hanya pemerintah saja, namun menyesuaikan dengan tujuan implementasi kebijakan agar dapat bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Ketepatan Target : Apakah target yang diintervensi sesuai yang dengan direncanakan sehingga tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, apakah target dalam kondisi siap diintervensi, dan apakah implementasi kebijakan bersifat baru atau implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan
 - a. Lingkungan Kebijakan : Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Lingkungan kebijakan berkaitan dengan kekuatan sumber otoritas dan komposisi jejaring dalam implementasi kebijakan.
 - b. Lingkungan Eksternal Kebijakan : Persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan berhubungan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat dan individu-individu yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

Konsep ketepatan menurut Richard E. Matland sejalan dengan konsep Nugroho karena kedua konsep tersebut membahas mengenai keberhasilan kebijakan publik bergantung pada implementasi yang tepat. Menurut Nugroho (2023:761) Ketepatan implementasi bertujuan untuk melihat seberapa jauh keefektifan implementasi program, sebagai berikut:

1. Tepat Muatan : Program sudah sesuai dengan isu atau agenda kebijakan dalam memecahkan masalah.
2. Tepat Pelaksana : Menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan implementasi program. Aktor implementasi tidak hanya pemerintah. Tiga lembaga pelaksana implementasi terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Tepat Target : Target yang diintervensi sudah sesuai dengan yang direncanakan, serta kesiapan dalam menghadapi kondisi target yang mendukung ataupun menolak.
4. Tepat Lingkungan : 1) Lingkungan Internal: interaksi antara organisasi pelaksana yang terlibat dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan 2) Lingkungan Eksternal: melibatkan persepsi publik atau tokoh masyarakat penting dalam mengartikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
5. Tepat Proses : Tepat proses berkaitan dengan 1) *Policy acceptance*: publik memahami tujuan kebijakan yang diimplementasikan; 2) *Policy adoption*: Publik mentaati kebijakan sebagai aturan, sementara pemerintah menerima kebijakan sebagai suatu tugas yang perlu diimplementasikan; dan 3)

Strategic readiness: Masyarakat ikut serta dalam melaksanakan kebijakan, sementara pemerintah menjadi aktor pelaksana kebijakan.

Ketepatan target dalam implementasi kebijakan merupakan penentuan penerima yang tepat, kesiapan kelompok sasaran dalam ikut serta, dan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut, bertujuan agar menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sudah relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan target tidak hanya berfokus pada identifikasi dan kesiapan kelompok sasaran, tetapi juga pada bagaimana proses implementasi dilakukan sehingga kebijakan tidak hanya diterapkan namun memberikan dampak positif kepada kelompok sasaran. Rangkuman teori implementasi program dalam tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Teori Korten, Matland, dan Nugroho tentang Kesesuaian Implementasi Program

Korten	Matland	Nugroho
1. Ketepatan Kebijakan 2. Ketepatan Pelaksanaan 3. Ketepatan Target 4. Ketepatan Lingkungan	1. Kesesuaian antara Program dan Penerima Pemanfaat 2. Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana 3. Kesesuaian antara Organisasi Pelaksana dan Penerima Pemanfaat	1. Tepat Muatan 2. Tepat Pelaksana 3. Tepat Target 4. Tepat Lingkungan 5. Tepat Proses

Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori kesesuaian implementasi David C. Korten dan konsep tepat target Riant Nugroho. Alasan peneliti memilih teori ini karena implementasi program tidak akan berhasil

jika program, kinerja pelaksana, dan proses pelaksanaan program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran sehingga dampak program tidak bermanfaat bagi kelompok sasaran. Kesesuaian implementasi oleh Korten menegaskan program tidak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika tidak terdapat tiga unsur kesesuaian, yakni program, organisasi pelaksana, dan penerima manfaat. Sementara itu, tepat target Riant Nugroho menekankan pentingnya kesiapan dan identifikasi yang jelas pada kelompok sasaran sehingga kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan kelompok sasaran relevan dengan kebutuhan masyarakat.

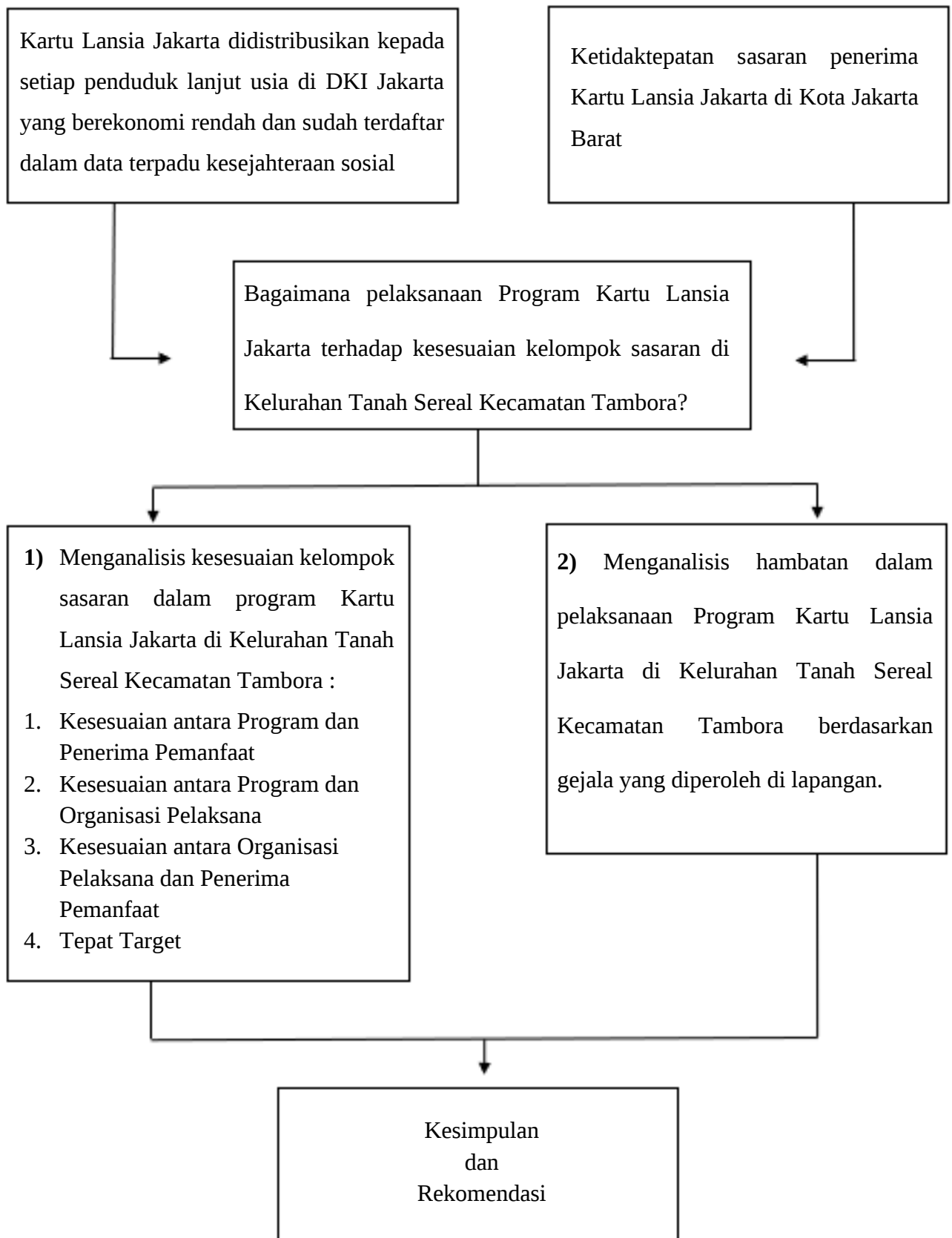
1.5.7 Program Kartu Lansia Jakarta

Program Kartu Lansia Jakarta merupakan program yang dibuat untuk membantu para lanjut usia yang tidak memiliki pendapatan tetap atau pendapatannya sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, rentan terhadap penyakit, serta lansia yang terlanjur secara psikis dan sosial. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia. KLJ diterbitkan oleh Bank DKI sebagai kartu ATM yang digunakan untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan transaksi pemegang kartu.

Kartu Lansia Jakarta diberikan kepada kelompok lanjut usia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan untuk mendapatkan KLJ adalah sebagai berikut: 1) Penduduk berusia 60 tahun ke atas; 2) Lansia dengan status ekonomi rendah yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mempunyai permasalahan fisik atau psikis. Jika belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, namun memenuhi syarat

sebagai penerima manfaat KLJ dapat diusulkan atau direkomendasikan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di kelurahan tempat mereka tinggal.

1.5.8 Kerangka Pikir Penelitian



1.6 Fenomena Penelitian

Kesesuaian atau ketepatan implementasi program merupakan proses pelaksanaan program secara terstruktur mulai dari kejelasan tujuan program dalam menanggapi isu publik, aktor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, dan kesesuaian kelompok sasaran sesuai dengan intervensi program. Implementasi program yang berhasil merupakan program yang berdampak langsung atau tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Penelitian ini menggunakan teori David C. Korten (dalam Bahri et al., 2020) dan Nugroho (2023) maka kesesuaian implementasi mencakup sub fenomena sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaat
 - a. Kesesuaian pendistribusian bantuan sosial kepada kelompok penerima manfaat
 - b. Kesesuaian syarat dan kriteria penerima program
 - c. Kesesuaian akses layanan program dengan kebutuhan penerima manfaat
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana
 - a. Kesesuaian kapabilitas aktor pelaksana program dengan tugas yang diisyaratkan program
 - b. Kesesuaian kompetensi aktor pelaksana program dalam proses verifikasi penerima manfaat
 - c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan sasaran program
3. Kesesuaian antara kelompok penerima pemanfaat dan organisasi pelaksana

- a. Kesesuaian pemahaman penerima manfaat sebagai penerima program
 - b. Kesesuaian daya tanggap petugas terhadap keluhan yang diajukan penerima manfaat program
 - c. Kesesuaian peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dengan manfaat yang diberikan oleh program
4. Tepat Target
- a. Ketepatan kelompok sasaran sebagai penerima program

Tabel 1. 6 Tabel Fenomena Penelitian

FENOMENA	SUB FENOMENA	INTERVIEW GUIDE
Kesesuaian sasaran dalam Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kec. Tambora		
1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaat	a. Kesesuaian pendistribusian Kartu Lansia Jakarta kepada kelompok lansia berekonomi rendah	1. Apakah pendistribusian Kartu Lansia Jakarta sudah sesuai diberikan kepada kelompok lansia berekonomi rendah di Kelurahan Tanah Sereal?
		2. Bagaimana mekanisme program dan pendistribusian Kartu Lansia Jakarta kepada kelompok lansia berekonomi rendah di Kelurahan Tanah Sereal?
	b. Kesesuaian syarat dan kriteria penerima program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah kriteria yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan penerima Kartu Lansia Jakarta?
		2. Apakah syarat yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan penerima Kartu Lansia Jakarta?
		3. Bagaimana cara proses verifikasi kepada kelompok penerima program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal?

	c. Kesesuaian akses layanan Program Kartu Lansia Jakarta dengan kebutuhan kelompok lansia berekonomi rendah	1. Apakah pengelola program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta dalam memberikan kemudahan informasi untuk tata cara mendaftarkan dan manfaat program Kartu Lansia Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok lansia di Kelurahan Tanah Sereal?
		2. Bagaimana cara pengelola program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta memberikan kemudahan kepada kelompok lansia dalam memanfaatkan layanan program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal?
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana	a. Kesesuaian kapabilitas aktor pelaksana program Kartu Lansia Jakarta dengan tugas yang diisyaratkan program	1. Apakah pengelola program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tujuan dan <i>standart operating procedur (SOP)</i> atau pedoman pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta? dan apakah terdapat pelatihan atau pembekalan agar aktor pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan?
		2. Bagaimana cara pengelola program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta berkomitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan kebutuhan program?
	b. Kesesuaian kompetensi aktor pelaksana program Kartu Lansia Jakarta dalam proses verifikasi penerima program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah pengelola program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria verifikasi penerima program sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan?
		2. Bagaimana kemampuan pengelolaan program dan petugas lapangan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal dalam mengelola data kemiskinan dan proses verifikasi penerima program Kartu Lansia Jakarta?

	c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan sasaran program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan program Kartu Lansia Jakarta, yaitu memastikan distribusi yang tepat sasaran dan merata kepada lansia yang membutuhkan di Kelurahan Tanah Sereal?
		2. Bagaimana cara sistem pengawasan program Kartu Lansia Jakarta dapat mengidentifikasi masalah atau kendala, seperti ketidaktepatan sasaran atau penyalahgunaan?
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana	a. Kesesuaian pemahaman kelompok lansia berekonomi rendah sebagai penerima program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah kelompok lansia sudah memahami prosedur pendaftaran untuk menjadi penerima program Kartu Lansia Jakarta mudah? dan apakah ada bagian dari program yang masih kurang jelas?
		2. Bagaimana harapan masyarakat kelompok lansia di Kelurahan Tanah Sereal terhadap pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta? dan apakah sudah sesuai harapan?
	b. Kesesuaian daya tanggap petugas terhadap keluhan yang diajukan penerima program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah petugas lapangan memberikan tindak lanjut sesuai dengan keluhan yang diajukan dalam proses pendaftaran dan proses verifikasi di Kelurahan Tanah Sereal?
		2. Bagaimana kesesuaian solusi yang diberikan petugas pelaksana di Kelurahan Tanah Sereal dengan masalah atau keluhan yang dihadapi oleh penerima program Kartu Lansia Jakarta?
	c. Kesesuaian peningkatan kesejahteraan lansia berekonomi rendah dengan manfaat yang diberikan oleh	1. Apakah program Kartu Lansia Jakarta sudah sesuai dalam membantu masyarakat kelompok lansia berekonomi rendah di Kelurahan Tanah Sereal dalam memenuhi kebutuhan dasar (makanan, kesehatan, dan kebutuhan harian lainnya)?

	program Kartu Lansia Jakarta	2. Apakah manfaat program Kartu Lansia Jakarta sudah sesuai dengan harapan kelompok lansia dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonom mereka?
4. Tepat Target	a. Ketepatan kelompok lansia berekonomi rendah sebagai penerima program Kartu Lansia Jakarta	1. Apakah masyarakat kelompok lansia berekonomi rendah di Kelurahan Tanah Sereal sudah memahami syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat kan manfaat dari program Kartu Lansia Jakarta?
		2. Bagaimana cara proses verifikasi dilakukan secara tepat dan akurat dalam menentukan kelompok lansia yang berhak menerima bantuan program Kartu Lansia Jakarta?

Menganalisis hambatan dalam penelitian ini menggunakan teori David C. Korten (dalam Bahri et al., 2020) karena menekankan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada kesesuaian antara organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan tujuan program.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya isu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora. Permasalahan mengenai ketidaktepatan sasaran menjadi perhatian publik karena orang-orang yang seharusnya tidak membutuhkan justru menerima bantuan sosial, sementara yang benar-benar memerlukan tidak menerima program tersebut.

Ketidaktepatan pelaksanaan program dapat terjadi karena kesalahan dalam pendataan, kurangnya verifikasi, dan monitoring. Ketidaktepatan sasaran juga

dapat terjadi jika calon penerima manfaat, yakni masyarakat lanjut usia tidak diberikan pemahaman mengenai program bantuan sosial ataupun penyalahgunaan bantuan sosial yang tidak digunakan untuk kebutuhan penerima manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah yang dirumuskan mengenai bagaimana kesesuaian kelompok sasaran dalam program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora dan hambatan dalam kesesuaian kelompok sasaran dalam program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata maupun gambar. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk memahami dan menekankan pada proses pelaksanaan kerja program dan interaksi antara aktor pelaksana dalam melaksanakan tugas dan masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono 2013:13) karakteristik penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi alamiah, yaitu keadaan yang ada di lapangan;
2. Menyajikan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, bukan angka;

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir; dan;
4. Bertujuan untuk memahami makna secara mendalam dari suatu gejala yang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Tempat berlangsungnya kegiatan penelitian dilaksanakan di Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kelurahan Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya isu sudah sesuai syarat dan kriteria program Kartu Lansia Jakarta namun tidak mendapatkan bantuan sosial yang membuat peneliti ingin tahu proses terkait penyaluran program Kartu Lansia Jakarta sampai kepada penerima manfaat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Informan penelitian termasuk bagian sangat penting untuk mengetahui informasi keberlangsungan pelaksanaan Program Kartu Lansia Jakarta dalam masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga informan diseleksi dan dipilih sesuai kriteria peneliti. Adapun subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
2. Penyuluh Sosial Ahli Pertama Bidang Perlindungan (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;

3. Koordinator Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) Kelurahan Tanah Sereal;
4. Petugas Pendata dan Pendamping Sosial Kelurahan Tanah Sereal;
5. Ketua RT Kelurahan Tanah Sereal; dan
6. Masyarakat Lanjut Usia Kelurahan Tanah Sereal.

1.8.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang berupa kata, tindakan, ataupun pernyataan hasil tindakan observasi atau pengamatan untuk menganalisis kesesuaian Program Kartu Lansia Jakarta bagi kelompok lanjut usia di Kelurahan Tanah Sereal Kec. Tambora. Penggambaran data kualitatif dalam penelitian ini merupakan keberjalanan pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta dengan, meliputi aktor yang terlibat dalam melaksanakan program dan masyarakat yang menerima dampak program tersebut.

1.8.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan informan penelitian di Dinas Sosial Provinsi DKI dan Kelurahan Tanah Sereal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Peneliti menggunakan sumber data sekunder,

seperti dokumen, laporan, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan berbagai sumber, cara, dan kondisi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) terdiri dari:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun langsung data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi menghasilkan gambaran kejadian, aktivitas, objek, dan kenyataan yang berkaitan dengan pengamatan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, pengamatan atau observasi dilakukan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kelurahan Tanah Sereal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan dan tanya jawab antara penanya dengan informan, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperoleh informasi keperluan penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini terstruktur dengan menggunakan *interview guide* sebagai pedoman wawancara dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencatatan berkaitan dengan data yang diperoleh berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi mengacu pada hasil atau proses di lapangan dari pengumpulan informasi tertulis dan tidak tertulis, seperti dokumen, laporan, surat kabar, notulen rapat, foto, dan video untuk mendukung dan memastikan data yang berkaitan dengan penelitian valid dan relevan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan sehingga menjelaskan data dengan pola atau tema tertentu agar setiap penafsiran data memperoleh maksud analisis dan mudah untuk dipahami. Ada tiga hal dalam analisis dan interpretasi data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemusatan pada penyederhanaan data. Menganalisis data hasil wawancara, observasi, dokumen tertulis, dan dokumentasi. Setelah analisis data, kemudian melakukan pemilihan data dengan memfokuskan dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif menyajikan data berupa teks naratif. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk

mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah setelah pengumpulan data dan pemilihan data. Peneliti menyusun kesimpulan yang dapat memberikan gambaran dari objek yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya untuk mengetahui hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data sehingga kualitas penelitian yang dihasilkan mewakili data yang terpercaya dan realistis. Menurut Sugiyono (2013: 273-274) pengujian kualitas data dapat menggunakan strategi triangulasi yang berarti membandingkan dan melakukan pemeriksaan kembali keabsahan data dari berbagai sumber yang didapatkan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga kualitas dari instrumen penelitian memberikan data yang valid keabsahannya.